

Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso No. 27-29, Periode 5-22 Mei 2014 = Apothecary Proffesion Internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso 27-29 on 5-22 May 2014

Verika Astriana Kartika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20390863&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kesehatan, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu meningkatkan upaya-upaya kesehatan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu peran terbesar di pemerintah pada bidang kesehatan adalah pada Suku Dinas Kesehatan yang memiliki tugas utama melaksanakan pelayanan perizinan, perencanaan, pengendalian dan penilaian terhadap efektifitas pelayanan kesehatan. Sebagai apoteker yang memiliki peranan penting dalam Suku Dinas Kesehatan Kota khususnya dibidang Farmasi Makanan dan Minuman sehingga seorang Apoteker perlu dibekali pengetahuan, pemahaman dan aplikasi tentang tata cara perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari sarana pelayanan kesehatan tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Apoteker yang berlangsung selama 10 hari sejak tanggal 5 Mei– 22 Mei 2014. Program PKPA ini dilaksanakan dengan harapan agar mahasiswa apoteker dapat mengambil manfaat dan ilmu sebanyak mungkin serta dapat memahami peran dan tanggungjawab seorang apoteker di pemerintahan khususnya Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara (Sudinkes Jakut). Prosedur perizinan di Sudinkes Jakut khususnya yang dilakukan Koordinator Farmasi Makanan Minuman sudah tertata dengan baik dan jelas karena telah diterapkannya sistem manajemen mutu sesuai standar ISO, namun untuk kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal) belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan karena masalah anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia untuk kegiatan tersebut.

.....

One of the human rights and well-being is an element that must be realized in accordance with the ideals of the nation of Indonesia as referred to in the Pancasila and the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is healthness, so government has an obligation to always step up efforts for the improvement of health health status of the people of Indonesia. One of the biggest roles in the government health sector is at the Sub-Department of Health which has the main task of carrying out licensing services, planning, control and assessment of the effectiveness of health care. As a pharmacist who has an important role in the Health Department in particular in the field of Pharmaceutical Food and Beverage so that a pharmacist needs to be equipped with the knowledge, understanding and application of the licensing procedures and guidance, supervision and control of the health care facilities. In order to achieve this, the program Pharmacist Pharmacy Faculty, University of Indonesia in cooperation with the North Jakarta Health Sub-Department held a Work Practice Pharmacist for student pharmacists, which lasted for 10 days from the date of May 22nd until May 5th 2014. PKPA program is implemented with the expectation that the

student pharmacist and science can benefit as much as possible and be able to understand the role and responsibilities of a pharmacist in government, especially in North Jakarta Health Sub-Department (Sudinkes Jakut). Licensing procedures in Sudinkes Jakut particularly by the Coordinator Pharmaceutical Food Beverage is well defined and obscured by the implementation of quality management system according to ISO standard, but for coaching activities, supervision, and control can not be optimally implemented due to budget problems and limited human resources for these activities.